

STRATEGI SEGMENTASI WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Putu Priancaya¹
Ketut Alit Suardana²

¹Fakultas Ekonomi Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia
e-mail:putu_priancaya@yahoo.com

²Fakultas Ekonomi Universitas Udayana(Unud), Bali, Indonesia

ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk mengetahui strategi segmentasi PKB dan BBNKB dalam mengoptimalkan penerimaan PAD Kota Denpasar. Penelitian ini menggunakan studi kasus. Obyek dari penelitian ini adalah PAD, PKB dan BBNKB di Kota Denpasar. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan strategi yang dapat dilakukan Pemda dalam hal ini, adalah Dispenda selaku otoritas pemungut pajak melalui Samsat (UPTD) Denpasar memaksimalkan penerimaan PKB dan BBNKB adalah (1) mempertegas sanksi, (2) Perbaikan sistem administrasi dan perpajakan.

Kata kunci: Strategi Segmentasi, PKB, BBNKB

ABSTRACT

The study aims to find out of strategy for PKB and BBNKB segmentation in optimalization of local tax (PAD) acceptance of Denpasar city. This study was used case study, and using descriptive qualitative approach. Object in this study were local origin income (PAD), vehicle tax (PKB) and Mutation tax (BBNKB) in Denpasar city. This study were used primary and secondary data. Technique of data analysis was used descriptive qualitative. The result shows that the strategy can be conducted by the local government in this case, the income service as the authority to pick up the tax through Samsat (UPTD) Denpasar can improve acceptance of PKB and BBNKB through (1) Tightening of sanction, (2) improve of tax administration system.

Keywords: Segmentation Strategy, PKB, BBNKB

PENDAHULUAN

Pemerintah Daerah Tingkat I yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pemungutan dan pengelolaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) khususnya, yang selanjutnya didistribusikan ke setiap Kabupaten dan Kota sebagai pajak bagi hasil secara proposional. Penerimaan pajak berpengaruh pada PAD masing-masing daerah.

Untuk menggarapnya, pemda seyogyanya mempunyai *database* yang cukup dan lengkap mengenai jumlah kendaraan bermotor di daerah masing-

masing. Hal ini sudah barang tentu didukung oleh data dan informasi yang valid mengenai keluar masuknya kendaraan bermotor yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan sebagai institusi, yang diberikan kewenangan dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB), ditambah data dari korporasi yang bertindak sebagai distributor/ subdistributor/ dealer kendaraan bermotor yang tersedia di masing-masing entitas bisnis.

Transaksi pengalihan hak atas kendaraan bermotor akan memunculkan jumlah penerimaan pajak, dikarenakan terjadinya proses transaksi legal formal, apakah transaksi karena diperoleh dari pembelian, hadiah dan atau warisan, sehingga beralihnya hak kepemilikan atas kendaraan pemilik awal. Pengalihan hak kepemilikan ini bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), akan menimbulkan hak dan kewajiban baru. Konsekuensinya kewajiban atas kepemilikan hak tersebut berupa beban atau biaya yaitu, harus membayar biaya administrasi dan pajaknya. Tujuan penelitian untuk mengetahui strategi segmentasi PKB dan BBNKB dalam meneoptimalkan penerimaan PAD Kota Denpasar.

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dalam Pasal 23 ayat 2 UUD 1945 menegaskan bahwa, agar setiap pajak yang akan dipungut haruslah berdasarkan Undang-Undang. Berdasarkan amendemen UUD 1945, ketentuan tersebut diatur dalam pasal 23A yang berbunyi: “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan

negara diatur dengan Undang-Undang”. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak yang harus dibayar pemilik kendaraan bermotor dan dibayar setiap setahun sekali.

Menyusun suatu perencanaan strategi tidak hanya dilakukan oleh entitas bisnis, melainkan untuk semua stakeholders. Dalam pembahasan strategi berkaitan dengan relevansi perumusan masalah. Untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam dalam penelitian ini, maka diberikan beberapa pengertian mengenai strategi menurut beberapa pakar berikut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan studi kasus menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu pendekatan dengan melakukan *Static attribute segmentation* yaitu cara memandang wajib pajak PKB dan BBNKB berdasarkan geografis dan demografi dan *Dinamic attribute segmentation* yaitu cara memandang wajib pajak PKB dan BBNKB berdasarkan sifat-sifat dinamis yang mencerminkan kesadaran (kepatuhan) dan karakter atau perilaku dan respon wajib pajak. Obyek dari penelitian ini adalah PAD, PKB dan BBNKB di Kota Denpasar. Prosedur pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, observasi partisipasi. Untuk menganalisis data dipergunakan analisis deskriptif-kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Cara memandang wajib pajak dengan berdasarkan geografis dan demografi. Geografis yaitu mensegemen (pemetaan) wajib pajak PKB berdasarkan wilayah Kabupaten/ Kota dan Kelurahan/ Desa. Demografi yaitu

mensegmen (pemetaan) wajib pajak berdasarkan jenis kelamin, usia, pekerjaan, pendidikan dan pendapatan..

Kota Denpasar terdiri menjadi empat kecamatan yaitu Denut, Denbar, Dentim dan Densel. Luas wilayah Kota Denpasar sebesar 127, 78 Km² ekuivalen dengan 12.778 hektar dan lahan yang tidak produktif 81 hektar.

PP No.37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2012, pencerminan penduduk Kota Denpasar pada tahun 2012 berjumlah 833.900 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki laki 424.800 jiwa (51,06 persen) dan penduduk perempuan 408.100 jiwa (48,94 persen). Kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar adalah Kecamatan Denpasar Selatan dengan penduduk sebesar 261.000 jiwa atau sebesar 31,30 persen dari seluruh penduduk Denpasar yang diikuti oleh Kecamatan Denpasar Barat 242.100 jiwa (29,00 persen), Kecamatan Denpasar Utara 185.600 jiwa (22,30 persen), dan Kecamatan Denpasar Timur 145.200 jiwa (17,40 persen).

Kepadatan penduduk adalah banyaknya penduduk per km², yang merupakan perbandingan jumlah penduduk dan luas wilayah. Kepadatan penduduk di Kota Denpasar pada tahun 2012 telah mencapai 6.526 jiwa per-km². Angka ini merupakan angka tertinggi di propinsi Bali. Dari 4 kecamatan, yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Denpasar Selatan sebesar 2.043 jiwa per km², diikuti 3(tiga) lainnya yaitu Kecamatan Denpasar Barat 1.895 jiwa per km², Kecamatan Denpasar Utara 1.425 jiwa per km², kemudian Kecamatan Denpasar Timur 1.136 jiwa per km².

Pendidikan memiliki nilai yang tinggi di dalam masyarakat, semakin tinggi pendidikan yang diperoleh, maka dapat memberikan hasil atau keuntungan-keuntungan yang lebih tinggi dari pendidikan yang diperoleh masyarakat. Tingkat pendidikan merupakan jenjang atau tingkat pendidikan dimulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan di masing-masing Kecamatan Kota Denpasar dapat ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 1.
Banyaknya Penduduk Menurut Pendidikan Tertinggi Tahun 2012 (Orang)

Kecamatan	Tdk/Belum Pernah Sekolah	Belum Tamat SD	SD	SMP	SMA	Diploma	Sarjana (S1,S2,S3)
DENSEL	24.679	60.695	52.836	41.612	50.407	18.285	12.486
DENTIM	57.745	27.341	20.716	17.316	14.756	2.680	4.646
DENBAR	21.265	37.441	47.768	44.428	65.346	9.118	16.733
DENUT	18.672	18.672	44.998	36.304	50.995	6.030	9.928

Sumber: Kota Denpasar Dalam Angka 2013

Pendapatan per kapita sebagai ukuran relative kesejahteraan suatu daerah atau merupakan pencerminan pendapatan rata-rata penduduk se-tahun. Data PDRB berdasarkan harga yang berlaku (harga pasar) per Kecamatan Kota Denpasar ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.
Komposisi PDRB per Kapita Menurut Kecamatan Kota Denpasar Tahun 2012

Kecamatan	PDRB Harga Belaku (Milyar Rupiah)	Laju Pertumbuhan PDRB (%)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	PDRB per Kapita Harga Berlaku (Rp)
DENSEL	4.491,32	7,00	261.000	17.210.000
DENTIM	2.602,08	6,86	145.200	17.920.000
DENBAR	4.416,36	7,26	242.100	18.420.000
DENUT	3.356,10	7,13	185.600	18.080.000

Sumber: Kota Denpasar Dalam Angka 2013

Besaran kenaikan Upah Minimum Kota Denpasar Tahun 2012 sebesar Rp 1.259.500 dan naik menjadi Rp 1.358.000 pada tahun 2013.

Kepribadian dan Gaya Hidup

Kepribadian adalah karakteristik psikologis seseorang yang menentukan dan merefleksikan bagaimana seseorang merespon lingkungannya. Gaya hidup merupakan kebiasaan atau tata cara menjalani kehidupan sesuai dengan lingkungan sosial.

Kesadaran Wajib PKB dan BBNKB

Banyak hal yang menyebabkan rendahnya kesadaran wajib pajak salah satunya adalah tidak adanya data tentang wajib pajak yang dapat digunakan untuk mengetahui kepatuhannya. Terkadang data dengan format yang berbeda.

Optimalisasi Penerimaan PKB Dan BBNKB

Mengingat penerimaan PKB dan BBNKB sangat diandalkan untuk menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka perlu kiranya pemungutan sumber penerimaan tersebut dioptimalkan. Strategi yang dapat dilakukan Pemda dalam hal ini, Dinas Pendapatan selaku otoritas pemungut pajak melalui Samsat (UPTD) Denpasar untuk meningkatkan penerimaan PKB dan BBNKB, sebagai berikut.

Pengetatan sanksi

Upaya untuk memperbaiki kesadaran masyarakat dalam membayar pajak diberlakukan sanksi yang memberatkan agar masyarakat jera atas kelalaiannya. Seperti yang tercantum dalam Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2004 tentang BBNKB, Pergub Bali No. 28 Tahun 2005 Tentang PKB, Pergub Bali No. 31 Tahun 2006 Tentang Perhitungan Dasar Pengenaan PBK dan

BBNKB dan Pergub Tentang Perhitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2007, yang mengatur tentang pengetatan sanksi dan sebagai upaya menyadarkan masyarakat untuk membayar PKB dan BBNKB secara tepat waktu guna mencapai target penerimaan pajak.

Reformasi Sistem Administrasi Perpajakan

Reformasi administrasi perpajakan diharapkan dapat mendorong penerimaan pajak dapat dilakukan dengan program modernisasi dengan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel didukung oleh sistem informasi teknologi yang handal dan terkini.

SIMPULAN DAN SARAN

Persoalan wajib pajak dalam membayar pajak memang di pengaruhi oleh banyak faktor di antaranya pendapatan dan latar belakang pendidikan wajib pajak yang relatif besar sehingga akan mengkondisikan kemampuannya untuk membayar pajak, oleh karena itu kondisi seperti ini akan membawa wajib pajak secara sadar memenuhi kewajibannya, demikian pula jika pendapatan dan pendidikan wajib pajak relatif rendah akan dapat melemahkan kemampuan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak. Alasannya karena bagi wajib pajak yang menghasilkan rendah, maka pemenuhan kewajiban membayar pajak akan diletakkan pada urutan ranking setelah kebutuhan utamanya terpenuhi.

Pendidikan wajib pajak merupakan dasar pengetahuan wajib pajak dalam merespon segala informasi tentang hakekat dan makna pembayaran pajak bagi kepentingan pembangunan nasional. Jika wajib pajak mempunyai pendidikan yang cukup memadai kemungkinan besar lebih baik di dalam memahami dan

mengerti akan arti dan makna serta hakekat pembayaran pajak bumi dan bangunan dan sebaliknya bagi wajib pajak yang memiliki latar belakang pendidikan kurang atau rendah kemungkinan besar di dalam memahami hakekat dan makna pentingnya membayar pajak agak relatif rendah, sehingga tingkat kesadarannya dalam membayar pajak akan berkurang.

Yang dapat dilakukan Pemda dalam hal ini, Dinas Pendapatan selaku otoritas pemungut pajak melalui Samsat (UPTD) Denpasar untuk memaksimalkan penerimaan PKB dan BBNKB, sebagai berikut. 1) Pengetatan sanksi , 2) Perbaikan Sistem Administrasi Perpajakan.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disarankan kepada pengambil kebijakan pajak terutama kendaraan bermotor sebagai berikut:

Masyarakat memiliki niat untuk membayar pajak secara ikhlas, tetapi terkadang keinginan menjadi surut ketika menghadapi persyaratan yang rumit, seperti identitas pemilik (KTP) tidak berlaku secara nasional atau provinsi, kenyataan dilapangan selalu dipermasalahkan ketika alamat pemilik kendaraan berbeda dengan yang tertera di surat wajib pajak, padahal mereka adalah wajib pajak yang sama. Oleh karena itu pengambil kebijakan tidak melakukan diskriminasi identitas diri berdasarkan daerah tetapi mengutamakan kemudahan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban membayar pajak. Untuk memudahkan masyarakat membayar pajak, sebaiknya menambah loket pembayaran pajak corner, agar masyarakat mudah menjangkaunya.

REFRENSI

- Barratt E.M. and Y. Smith S. 2005. Examination of an Altered Barcode on a Vehicle ax Disc. *Science & Justice*, Vol. 45, No. 3, Juli.
- Feltensein, Andrew and Shigeru Iwata. 2005. Decentralization and Macroeconomic Performance in China: Regional Autonomy Has Its Costs. *Journal of Development Economics*, Vol. 76, No. 2 (April).
- Gunadi, 2007. *Rumitnya Menggapai Rencana Penerimaan Pajak*, diunduh dari www.pajak.go.id, diakses Januari 2013.
- Haan, Peter de; Anja Peters, and Roland W. Scholz. 2007. Reducing Energy Consumption in Road Transport Through Hybrid Vehicles: Investigation of Rebound Effects, and Possible Effects of Tax Rebates. *Journal of Cleaner Production*, Vol. 15, No. 11-12.
- Ilyas, Wirawan B. Dan Richard Burton. 2007. *Hukum Pajak*. Edisi Revisi. Salemba Empat: Jakarta.
- Irianto, Slamet Edi, 2005, *Politik Perpajakan: Membangun Demokrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta.
- Klepper, Steven dan Daniel Nagin . 1989. "Tax Compliance and Preceptions of the Risks of Detection and Criminal Prosecution". *Law Society Review*. No 2: 209 -240.
- Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2004 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor.
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- Peraturan Gubernur Tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2007.

Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2012 Tentang Kebijakan Akuntansi Piutang Pemerintah Daerah Provinsi Bali.

Roades, Shelley C.1999. *The Impac of Multiple Component Reporting on ax Compliance and Audit Strategis* , *the Accounting Review*, Vol 74. No 1, January, p. 63-85.

Suardana, Ketut Alit ,2012, Strategi segmentasi wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (studi kasus di Kabupaten Buleleng) *Penelitian* tidak dipublikasikan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Penerbit Buku Berita Pajak: Jakarta.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.